



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024 di Desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongodow Selatan

Political Stability Ahead of the 2024 Simultaneous Elections in Tonala Village, Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency

Pauzul Husni Botutihe^{1*}, Udin Hamim², Ramli Mahmud³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

*Author Correspondence: Email: botutihepauzul@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Aug, 2025

Revised: 15 Sep, 2025

Accepted: 10 Oct, 2025

Kata Kunci:

Stabilitas Politik; Pemilu Serentak 2024; Desa Tonala; Konflik Politik; Partisipasi Politik

Keywords:

Political Stability; 2024 Simultaneous Elections; Tonala Village; Political Conflict; Political Participation

DOI: [10.56338/jks.v8i10.8763](https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8763)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi stabilitas politik menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Stabilitas politik dipandang sebagai elemen penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara aman, damai, dan demokratis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta perwakilan partai politik setempat, dan juga melalui studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, situasi politik di Desa Tonala menjelang Pemilu Serentak 2024 secara umum tergolong cukup kondusif. Meskipun terdapat dinamika politik berupa persaingan antar pendukung calon legislatif dan partai politik, potensi konflik masih dapat diredam melalui peran aktif tokoh masyarakat dan aparat desa dalam menjaga komunikasi dan mediasi antar kelompok. Faktor-faktor yang mendukung stabilitas politik antara lain: kesadaran politik masyarakat yang semakin meningkat, netralitas aparat pemerintah desa, serta pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu dan pihak keamanan. Meski demikian, hasil penelitian turut mengidentifikasi adanya potensi kerawanan, seperti praktik politik uang, penyebaran hoaks, serta fanatisme yang berlebihan, yang dapat mengancam stabilitas jika tidak segera diantisipasi secara preventif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan terciptanya iklim politik yang kondusif dan demokratis menjelang pelaksanaan pemungutan suara.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the situation of political stability ahead of the 2024 Simultaneous Elections in Tonala Village, Posigadan District, South Bolaang Mongondow Regency. Political stability is viewed as an essential element in ensuring that elections are conducted safely, peacefully, and democratically. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including field observation, in-depth interviews with community leaders, village officials, and local political party representatives, as well as documentation studies. Based on the findings, the political situation in Tonala Village ahead of the 2024 Simultaneous Elections is generally considered fairly conducive. Although there are political dynamics in the form of competition among legislative candidates' supporters and political parties, potential conflicts can still be mitigated through the active role of community leaders and village officials in maintaining communication and mediation between groups. The factors supporting political stability include increasing political awareness among the community, the neutrality of village government officials, and supervision from election organizers and security authorities. Nevertheless, the study also identifies potential vulnerabilities such as money politics, the spread of hoaxes, and excessive fanaticism, which could threaten stability if not addressed preventively. Therefore, strong collaboration between the government, election organizers, security apparatus, and active community participation is required to ensure the creation of a conducive and democratic political climate ahead of the voting process.

PENDAHULUAN

Menurut pendapat Max Weber (Maran, 2001 : 22) mengutarakan pengertian daripada politik sebagai berikut : “Politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik di antara negara maupun di antara kelompok-kelompok didalam suatu negara”.

Mendefinisikan partai politik bukanlah hal yang mudah, para ahli yang mempelajari partai-partai politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda. Secara umum partai politik menurut pendapat Maran (2001 :84) mendefinisikan sebagai berikut: “ Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan”. Anggota-anggota kelompok tersebut memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik bertindak sebagai penghubung organisasi dan psikologis antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, partai politik mensintesis dan mengekspresikan beragam tuntutan yang muncul di berbagai kelompok sosial. Selain itu, partai politik juga mencari kandidat yang kompeten untuk posisi eksekutif dan mengajak orang untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat (Suimi Fales, 2018).

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan sejahtera. Efektivitas pelaksanaan fungsi partai politik sangat bergantung pada adanya hubungan akuntabilitas yang saling menguatkan antara partai dengan masyarakat. Dalam kerangka hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi warga negara. Melalui partai politik, masyarakat diberi ruang untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi guna mewujudkan tatanan negara yang adil dan makmur. Selama beberapa dekade terakhir, partai politik telah memperoleh posisi strategis sebagai fondasi utama demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Keberadaan mereka mencerminkan kontribusi nyata dalam pemberdayaan politik masyarakat melalui berbagai peran dan kinerja yang dijalankan. Untuk menciptakan keseimbangan, stabilitas, dan kestabilan politik, stabilitas politik merupakan kondisi politik yang dinamis.

Stabilitas politik merupakan kondisi dinamis dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan komponen kunci politik, yaitu distribusi dan pembentukan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam negara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, stabilitas politik merupakan kondisi dinamis di mana proses distribusi kekuasaan negara tidak boleh irasional, inkonstitusional, atau menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Kewaspadaan nasional diharapkan dapat berkontribusi pada tercapainya kondisi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait ketegangan politik dan stabilitas demokrasi di Indonesia. Penelitian oleh Andriyani et al. (2021) menyoroti peran elit politik dalam mengelola konflik pasca pemilu. Kahpi et al., (2024) membahas dampak media sosial terhadap persepsi publik dan ketegangan politik. Namun, masih terdapat kekosongan dalam literatur yang mengkaji secara integratif peran lembaga negara, media, partai politik, dan masyarakat dalam konteks ketegangan politik pasca pemilu serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa penelitian yang membahas studi kasus mengenai polarisasi politik, dampak pemilu kontroversial, konflik pasca-pemilu, peran media massa, dan dinamik koalisi pemerintahan yang memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas dinamik politik pasca-pemilu. Bahaya polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas demokrasi dengan menekankan bahwa polarisasi yang ekstrem dapat melemahkan lembaga-lembaga demokratis dan memicu konflik politik yang mempengaruhi stabilitas politik suatu negara (Tomz et al., 2020; Zaslove et al., 2021). Muhtar et al., (2023) menunjukkan bahwa pemilu yang kontroversial dapat mengganggu stabilitas politik dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi, terutama jika pemilu dipenuhi dengan tuduhan kecurangan dan polarisasi politik yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bertujuan untuk meneliti (1). Bagaimana kondisi stabilitas politik menjelang pemilu serentak di desa Tonala kec. Posigadan kab. Bolaang

mongondow selatan. (2). Apa saja faktor yang menghambatnya terwujudnya stabilitas politik menjelang pemilu serentak di desa Tonala Kec. Posigadan Kab. Bolaang mongondow selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2002). Penelitian kualitatif merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif merupakan studi segala sesuatu dalam setting alamiah mereka, berusaha mengerti dan menginterpretasi, fenomena dalam pengertian sesuai arti masyarakatnya. (Hasan et al, 2023).

Pada penelitian kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara (interview). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui teknik pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis. Pada penelitian ini terdapat 10 informan yang terdiri dari: 2 pemerintah desa dan 8 perwakilan pemuda/masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stabilitas politik menjelang pemilu serentak

Menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, situasi politik di Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Gorontalo, memperlihatkan perkembangan yang unik sesuai dengan karakter lokalnya. Berdasarkan penelitian budaya politik masyarakat Desa Tonala, ditemukan bahwa orientasi politik masyarakat cenderung mengikuti keputusan kepala keluarga atau orang tua. Budaya politik ini dipengaruhi oleh faktor kekerabatan yang kuat, yang dapat memengaruhi pilihan politik individu dalam pemilu. Secara keseluruhan, meskipun budaya politik di Desa Tonala menunjukkan kecenderungan mengikuti keputusan keluarga, upaya dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang Pemilu Serentak 2024.

Hasil temuan peneliti ini menyoroti budaya politik masyarakat yang cenderung parokial, di mana partisipasi politik masih dipengaruhi oleh keputusan kepala keluarga atau orang tua. Selain itu, faktor patron-klien dan kekerabatan memperkuat pengaruh hubungan sosial dalam menentukan pilihan politik, yang dapat memengaruhi objektivitas dan keberagaman pilihan dalam pemilu.

Implikasi terhadap stabilitas politik

Berdasarkan hasil penelitian implikasi terhadap stabilitas politik di Desa Tonala menjelang pemilu serentak didapatkan bahwa menjelang pemilu, situasi politik di Desa Tonala menunjukkan dinamika yang menarik untuk dianalisis. Secara umum, stabilitas politik di desa ini masih terjaga, meskipun ada peningkatan tensi yang mulai terasa, terutama di media sosial. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan minat politik yang tinggi di kalangan warga. Namun, dengan meningkatnya penggunaan media sosial, terjadi fenomena baru di mana perdebatan politik sering kali berujung pada konflik verbal, terutama di antara ibu-ibu yang merupakan pengguna aktif platform tersebut.

Meskipun situasi politik di Desa Tonala masih relatif stabil, perhatian harus diberikan pada dinamika yang terjadi di media sosial. Dengan meningkatnya tensi politik di platform tersebut, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mendidik masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses politik secara sehat dan konstruktif.

Di Desa Tonala, media sosial telah muncul sebagai platform vital bagi dinamika politik. Seiring dengan semakin banyaknya akses internet, Facebook dan WhatsApp telah menjadi wadah utama bagi

warga setempat untuk bertukar informasi dan pandangan tentang pemilu. Di sisi positifnya, media sosial memudahkan warga setempat untuk mengetahui tentang politisi yang mencalonkan diri. Misalnya, banyak kandidat menggunakan platform ini untuk berbicara langsung kepada publik tentang tujuan dan ambisi mereka. Di sisi lain, media sosial juga telah berkembang menjadi platform penyebaran informasi palsu, termasuk hoaks.

Fenomena ini menciptakan suasana yang rentan terhadap konflik. Dalam beberapa kasus, perdebatan yang awalnya bersifat konstruktif dapat berubah menjadi saling serang. Hal ini terutama terjadi di kalangan ibu-ibu yang lebih aktif berkomunikasi di media sosial. Pentingnya pendidikan literasi digital tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, termasuk cara mengenali informasi yang valid dan tidak valid. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh misinformasi.

Meskipun situasi politik di lapangan relatif stabil, potensi konflik bisa meningkat jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk memantau dan mengelola informasi yang beredar di media sosial. Provokasi dari luar dan penyebaran hoaks juga menjadi ancaman yang nyata. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi tentang literasi media menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan informasi yang mereka konsumsi.

Kegiatan sosialisasi mengenai netralitas ASN serta penyuluhan terkait politik damai yang diselenggarakan oleh pemerintah desa merupakan upaya konstruktif dalam menjaga kestabilan situasi politik. Pelibatan tokoh agama dan kalangan pemuda sebagai pihak penengah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis meskipun terdapat perbedaan pandangan politik. Partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam proses politik juga berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya demokrasi.

Selain itu, peran tokoh masyarakat dalam menengahi perdebatan di media sosial juga sangat krusial. Tokoh agama dan pemuda yang dilibatkan dalam proses sosialisasi bisa menjadi panutan bagi warga dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan pendekatan yang positif, diharapkan mereka bisa membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis meskipun ada perbedaan pandangan politik.

Secara keseluruhan, stabilitas politik menjelang pemilu di Desa Tonala masih relatif terjaga, meskipun terdapat peningkatan tensi di media sosial. Masyarakat menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, dengan banyak yang berupaya menjaga kerukunan meskipun memiliki perbedaan pandangan. Namun, potensi konflik tetap ada, terutama jika terjadi penyebaran hoaks atau provokasi dari luar. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan aparat keamanan, untuk terus berkoordinasi dan melakukan sosialisasi yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik.

Beberapa penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran yang jelas mengenai stabilitas politik menjelang pemilu. Penelitian oleh Nurhayati (2021) mengungkapkan bahwa media sosial dapat menjadi *double-edged sword* dalam konteks politik. Di satu sisi, media sosial berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi dan memperkuat keterlibatan politik, namun di sisi lain, juga dapat menjadi sarana penyebaran hoaks yang dapat memicu konflik. Dalam konteks Desa Tonala, fenomena ini sangat relevan, karena banyak ibu-ibu yang menggunakan media sosial untuk berdiskusi tentang politik, namun juga rentan terhadap informasi yang tidak akurat.

Dalam situasi ini, penting untuk terus menggali melalui penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika politik di Desa Tonala, khususnya menjelang pelaksanaan pemilu mendatang. Dengan mengenali pola-pola yang berkembang, berbagai langkah antisipatif dapat dirancang untuk menjaga kestabilan politik serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Tindakan individu atau sekelompok orang yang berpartisipasi aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara dan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi kebijakan publik dan pemerintah dikenal sebagai partisipasi publik dalam pemilu. Inisiatif pelibatan publik masih dipandang sebagai upaya untuk mengorganisir masyarakat demi kepentingan pemerintah atau negara. Sebagai bagian dari kendali publik atas kebijakan pemerintah, keterlibatan publik idealnya melibatkan partisipasi anggota masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa menjelang Pemilu Serentak 2024, tingkat keterlibatan masyarakat di Desa Tonala mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Berbagai inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan politik oleh pemerintah desa dan warganya telah mendorong peningkatan keterlibatan ini. Penyelenggaraan acara sosialisasi pemilu dengan berbagai anggota masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan tokoh adat, merupakan salah satu langkah yang terencana. Tujuan utama dari acara-acara ini adalah untuk memperdalam pemahaman mereka tentang pentingnya memilih dan konsekuensi dari keputusan mereka.

Antusiasme warga Desa Tonala terlihat jelas dalam berbagai kegiatan politik yang dilaksanakan menjelang pemilu. Banyak warga yang aktif mengikuti sosialisasi pemilu, yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pemilih yang sudah terdaftar, tetapi juga memberikan informasi kepada mereka yang baru pertama kali akan memberikan suara.

Salah satu contoh nyata dari partisipasi aktif masyarakat adalah keterlibatan mereka sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Banyak pemuda yang mendaftar untuk menjadi petugas KPPS, yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli dengan hasil pemilu, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan dengan baik. Partisipasi perempuan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Melalui organisasi seperti PKK, Perempuan di Desa Tonala aktif dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih dan penyuluhan politik. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah pemilih perempuan, tetapi juga mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Generasi muda di Desa Tonala memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat menjelang pemilu. Mereka tidak hanya menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga berkontribusi dalam penyebaran informasi dan edukasi politik. Banyak dari mereka yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti Karang Taruna, yang secara aktif mengadakan diskusi dan kegiatan edukasi politik.

Selain itu, generasi muda juga berperan sebagai jembatan antara calon legislatif dan masyarakat. Mereka seringkali menjadi relawan dalam kampanye calon legislatif, membantu dalam penyebaran informasi dan mengorganisir pertemuan dengan warga. Dengan cara ini, mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga membantu calon legislatif dalam memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan langkah positif dalam menjembatani komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen.

Partisipasi aktif generasi muda di Desa Tonala diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas demokrasi di desa tersebut. Dengan keterlibatan mereka, diharapkan pemilu tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun kesadaran politik yang lebih baik di kalangan masyarakat. Keberlanjutan partisipasi ini diharapkan dapat menciptakan generasi pemimpin yang lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap aspirasi rakyat.

Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak tergolong tinggi dan cukup aktif. Masyarakat menunjukkan antusiasme dalam berbagai bentuk, seperti menghadiri kampanye, mengikuti sosialisasi pemilu, serta menjadi penyelenggara atau relawan di tingkat lokal. Peran generasi muda sangat menonjol dalam menyebarkan informasi dan edukasi politik, terutama

melalui media sosial dan forum diskusi desa. Kelompok perempuan juga berpartisipasi melalui kegiatan pemberdayaan dan pendidikan pemilih. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kesadaran demokratis, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial warga terhadap masa depan desa mereka.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan di Desa Suka Maju oleh Fitria (2021) menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi pemilih hingga 30%. Selain itu, penelitian Hidayah dari tahun 2022 menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu dapat dikurangi hingga 25% ketika masyarakat dilibatkan dalam pemantauan pemilu. Penelitian-penelitian ini menunjukkan betapa penting dan relevannya upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu di Desa Tonala. Suharto (2020) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup kemampuan untuk memilih; tetapi juga mencakup jenis keterlibatan politik lainnya, termasuk kampanye, diskusi, dan pemantauan pemilu. Mengingat hal ini, keterlibatan masyarakat Desa Tonala menjelang pemilu serentak tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Masyarakat dengan budaya politik yang kuat lebih mungkin berpartisipasi dalam pemilu sebagai pemilih dan pemantau pemilu, menurut penelitian Ramadhan (2021).

Integritas pemilu

Berdasarkan hasil penelitian integritas pemilu di Desa Tonala menjelang pemilu serentak didapatkan bahwa di Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, integritas pemilu tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan politik yang ada. Budaya patronase yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku politik masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022), ditemukan bahwa masyarakat desa lebih cenderung mengikuti pilihan tokoh masyarakat atau kepala keluarga dalam menentukan pilihan politik mereka. Hal ini menunjukkan rendahnya partisipasi politik yang independen dan kritis dari warga desa.

Hubungan kekerabatan juga memainkan peran yang signifikan dalam pemilihan umum. Penduduk Desa Tonala memiliki hubungan kekerabatan yang erat, yang sering kali memengaruhi keputusan politik. Keterikatan ini membuat warga merasa terikat untuk mengikuti pilihan kelompok, bukan berdasarkan penilaian pribadi terhadap calon. Warga Desa Tonala yang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Ini berimplikasi pada rendahnya kesadaran untuk memilih secara kritis dan mandiri. Tanpa pemahaman yang memadai, warga cenderung menerima informasi dari sumber yang tidak kredibel, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam pemilu.

Netralitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan pemilu di Desa Tonala. PPS telah menandatangani pakta integritas yang menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam kampanye atau menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu. Pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dilakukan secara berkala.

Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Dengan menciptakan sistem pengaduan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu di Desa Tonala.

Budaya patronase di Desa Tonala memiliki dampak signifikan terhadap pilihan politik masyarakat. Dalam banyak kasus, warga desa lebih memilih untuk mengikuti pilihan tokoh masyarakat atau keluarga besar daripada membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi. Sebuah studi oleh Arifin (2023) mencatat bahwa responden merasa tertekan untuk memilih calon tertentu karena pengaruh dari tokoh adat atau pemimpin lokal.

Faktor-Faktor Penghambat Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak

Faktor Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai faktor penghambat dalam stabilitas politik menjelang pemilu serentak dari segi faktor sosial didapatkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor sosial yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Tonala. Hasil wawancara menunjukkan bahwa warga yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, seperti lulusan SMA atau perguruan tinggi, cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam politik. Mereka lebih sering bertanya, mengikuti rapat, dan memiliki pilihan politik yang lebih mandiri.

Sebaliknya, warga yang memiliki tingkat pendidikan rendah seringkali merasa tidak percaya diri atau bahkan apatis terhadap proses politik. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa responden yang mengaku mengikuti pilihan politik suami atau kepala keluarga tanpa memahami isu-isu yang ada. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakberdayaan dan kurangnya literasi politik di kalangan masyarakat yang kurang berpendidikan.

Pentingnya pendidikan politik di Desa Tonala tidak bisa diabaikan. Program-program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat perlu diperkuat. Misalnya, penyelenggaraan seminar atau workshop tentang pentingnya partisipasi politik dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis edukasi dan peningkatan kapasitas warga sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi yang lebih berkualitas. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara nominal, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang matang.

Budaya lokal di Desa Tonala juga berperan penting dalam mempengaruhi partisipasi politik. Masyarakat desa ini memiliki tradisi yang kuat dalam menghormati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketika tokoh agama mendukung salah satu calon, banyak warga yang cenderung mengikuti pilihan tersebut. Hal ini terjadi karena tokoh agama dianggap sebagai panutan moral dan dipercaya oleh masyarakat. Menurut penelitian oleh Mulyadi (2021), pengaruh tokoh agama dalam pemilu di desa-desa di Indonesia dapat mencapai 60% dalam menentukan pilihan pemilih.

Dalam konteks ini, penting bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan damai dan mengajak masyarakat untuk tetap menghormati perbedaan pendapat. Pengajian dan pertemuan rutin yang diadakan oleh tokoh agama dapat menjadi sarana efektif untuk meredakan ketegangan politik menjelang pemilu. Dengan demikian, budaya saling menghormati dan kebersamaan dapat tetap terjaga, meskipun ada perbedaan pilihan politik.

Literasi politik merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesadaran politik masyarakat di Desa Tonala. Meskipun partisipasi politik di desa ini terlihat tinggi, banyak warga yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak warga yang tidak mengetahui proses pemilihan atau bahkan tidak memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kebijakan publik.

Kurangnya literasi politik ini menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas politik menjelang pemilu. Masyarakat yang tidak paham akan hak-hak politiknya cenderung mudah terpengaruh oleh berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media sosial, penting untuk meningkatkan literasi politik agar masyarakat dapat memilah informasi dengan baik.

Pendidikan politik yang ditujukan kepada masyarakat desa harus dilaksanakan secara terus-menerus. Berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, penyuluhan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang tepat dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran politik warga. Dengan peningkatan pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab mereka, diharapkan masyarakat Desa Tonala dapat mengambil bagian secara lebih aktif dan berkualitas dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang.

Hubungan sosial antarwarga di Desa Tonala masih tergolong baik. Masyarakat tetap saling menyapa, bergotong royong, dan menjaga keharmonisan meskipun menjelang pemilu terdapat perbedaan pilihan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan masih sangat kuat di desa ini, dan hingga saat ini, belum ada konflik yang berarti yang muncul akibat perbedaan pilihan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat, masyarakat tetap mengutamakan persatuan dan kebersamaan.

Namun, media sosial juga turut berperan dalam menciptakan ketegangan di kalangan masyarakat. Beberapa komentar yang menyinggung dapat memicu perdebatan, tetapi umumnya masalah ini cepat diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat di Desa Tonala memiliki kesadaran untuk menjaga hubungan baik di antara mereka, dan sering mengingatkan bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Ini merupakan upaya yang baik untuk mencegah konflik yang lebih besar.

Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di desa ini aktif memberikan imbauan agar warga tidak terpancing provokasi. Dengan menjaga komunikasi yang baik antarwarga, diharapkan Desa Tonala dapat menghadapi pemilu serentak dengan lebih stabil dan harmonis. Menurut penelitian oleh Sari (2022), komunikasi efektif antarwarga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas politik di tingkat desa.

Politik Uang

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai faktor penghambat dalam stabilitas politik menjelang pemilu serentak dari segi faktor politik uang didapatkan bahwa politik uang di Desa Tonala praktik politik uang masih terjadi secara masif, Politik uang menjadi strategi yang lazim dilakukan oleh beberapa calon kepala desa. Warga menerima uang atau barang (sembako) menjelang hari pencoblosan, menunjukkan bahwa politik uang dianggap hal yang biasa dalam proses Pilkadaes. Kesadaran Politik Masyarakat Masih Rendah Sebagian warga belum memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan integritas calon. Banyak dari mereka lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi sesaat dibanding visi-misi jangka panjang calon pemimpin. Tekanan Sosial dan Moral Mempengaruhi Pilihan Warga yang menerima uang atau bantuan sering merasa terikat secara moral untuk memilih calon pemberi, meskipun secara hati nurani ingin memilih calon lain. Ini menunjukkan adanya dilema etika dalam masyarakat.

Politik uang merupakan fenomena yang sering kali muncul dalam konteks pemilihan umum, termasuk di Desa Tonala. Menurut KPU (Komisi Pemilihan Umum) Republik Indonesia, praktik politik uang didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud untuk memengaruhi pilihan mereka. Di Desa Tonala, meskipun belum ada bukti konkret mengenai praktik ini, banyak warga yang meyakini bahwa politik uang adalah hal yang umum terjadi setiap kali pemilu mendekat. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di masyarakat mengenai praktik yang dianggap tidak etis ini.

Dalam kajian ini, penting untuk memahami bahwa politik uang tidak hanya sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek budaya dan sosial. Di Desa Tonala, budaya politik yang mengedepankan hubungan kekerabatan dan patron- klien berkontribusi terhadap keberlangsungan praktik politik uang. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2019) yang menunjukkan bahwa di banyak daerah, hubungan sosial yang kuat sering kali menjadi sarana untuk memfasilitasi praktik politik uang.

Stabilitas politik di Desa Tonala telah terdampak signifikan oleh politik uang. Praktik ini pada awalnya membuat proses pemilihan umum menjadi tidak adil. Calon yang memiliki sumber daya lebih banyak cenderung dapat membeli suara, sementara calon yang tidak mampu secara finansial terpaksa kalah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial. Menurut penelitian oleh Prabowo (2022), ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan penurunan partisipasi pemilih di pemilu berikutnya, yang berimplikasi pada legitimasi pemerintahan yang terpilih. Politik uang dapat merusak integritas lembaga-lembaga politik. Ketika

masyarakat terbiasa dengan praktik ini, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap praktik politik uang di Desa Tonala. Pertama, faktor ekonomi memainkan peran penting. Banyak masyarakat desa yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka lebih rentan terhadap tawaran uang atau barang menjelang pemilu. Kedua, budaya politik yang ada di desa juga mempengaruhi. Budaya patron-klien yang kuat di Desa Tonala menciptakan hubungan di mana calon yang memberikan bantuan dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan warga desa yang menyatakan bahwa mereka merasa tertekan untuk memilih calon yang memberikan bantuan, meskipun mereka tahu bahwa praktik tersebut tidak etis. Ketiga, kurangnya edukasi politik di masyarakat juga berkontribusi pada keberlangsungan praktik politik uang. Banyak warga desa yang tidak memahami konsekuensi dari politik uang terhadap demokrasi dan stabilitas politik. Upaya edukasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga sering kali tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesadaran akan pentingnya pemilihan yang bersih dan adil masih rendah.

Dengan demikian, praktik politik uang di Desa Tonala menjadi salah satu penghambat utama dalam mencapai stabilitas politik menjelang pemilu serentak. Meskipun belum ada bukti nyata, kepercayaan masyarakat terhadap praktik ini menunjukkan bahwa hal tersebut perlu ditangani dengan serius. Faktor ekonomi, budaya politik, dan kurangnya edukasi menjadi pendorong utama praktik politik uang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga terkait.

Polarisasi Politik Masyarakat

Dampak polarisasi politik di Desa Tonala terlihat jelas dalam konteks stabilitas politik menjelang pemilu serentak, sebagaimana dibuktikan oleh temuan penelitian tentang faktor-faktor yang menghambat stabilitas politik. Polarisasi yang semakin besar dapat memicu ketegangan antarkelompok masyarakat dengan pandangan politik yang berbeda, sebuah fenomena yang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional.

Salah satu kenyataan dari dampak negatif polarisasi politik adalah ketika dua kelompok masyarakat di Desa Tonala terlibat dalam perselisihan terkait kandidat yang mereka dukung. Ketegangan ini semakin meningkat menjelang pemilu, dan dapat mengakibatkan pembagian dalam komunitas, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik. Desa dengan tingkat polarisasi politik yang tinggi cenderung mengalami peningkatan konflik sosial, yang dapat mengganggu proses pemilihan umum.

Polarisasi politik juga tidak selalu buruk. Dalam situasi tertentu, hal itu dapat menginspirasi individu untuk berperan aktif dalam proses politik. Namun, polarisasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai. Oleh karena itu, inisiatif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat sangat penting untuk menghentikan dampak buruk polarisasi. Pemerintah desa dan tokoh masyarakat perlu membentuk forum wacana produktif dalam menghadapi pemilihan umum serentak. Untuk mengurangi ketegangan dan menjaga stabilitas politik, diyakini bahwa kontak yang efektif antar berbagai faksi dapat terjalin.

Generasi muda memainkan peran yang sangat penting dalam proses polarisasi politik di Desa Tonala. Meskipun saat ini keterlibatan mereka dalam politik masih tergolong rendah, mereka memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Media sosial menjadi platform utama bagi generasi muda untuk berinteraksi dan berbagi informasi. Namun, meskipun banyak anak muda yang aktif di media sosial, belum banyak yang benar-benar peduli terhadap politik desa.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa polarisasi politik di Desa Tonala bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan bagian dari dinamika yang lebih besar dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi polarisasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang

mempengaruhinya dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas politik di desa menjelang pemilu serentak.

Dengan demikian, polarisasi politik di Desa Tonala merupakan fenomena yang kompleks, dengan potensi untuk menjadi penghambat stabilitas politik menjelang pemilu serentak. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, tantangan seperti politik uang dan apatisme masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi polarisasi politik, termasuk peningkatan pendidikan politik, penciptaan ruang dialog yang inklusif, dan penggunaan media sosial secara positif.

Polarisasi politik di Desa Tonala merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik menjelang pemilu serentak. Meskipun ada potensi positif dari polarisasi, seperti mobilisasi masyarakat, dampak negatifnya jauh lebih besar, termasuk peningkatan konflik sosial, penyebaran berita palsu, dan apatisme politik.

KESIMPULAN

Budaya politik yang berkembang saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap stabilitas politik menjelang Pemilu Serentak 2024 di Desa Tonala, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan hasil kajian mengenai stabilitas politik di desa tersebut, terlihat bahwa masyarakat yang cenderung mengikuti arahan kepala keluarga serta terikat oleh jaringan kekerabatan menjadikan pemilu bukan sekadar mekanisme politik semata, melainkan juga mencerminkan kompleksitas hubungan sosial yang ada di dalam komunitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dachlan 2014:1. "Demokrasi Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 61 (2014): 22–31.
- Fales, S. (2018). Fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik ditinjau dari hukum positif. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>.
- Khopipah, Siti, Komunikasi Strategis, Hubungan Masyarakat, Sosialisasi Dan, Pendidikan Pemilih, Di Masa, Pendidikan Pemilu, et al. "Issn: 2541-2078," n.d., 1–227.
- Khusnul Catur Prasetya, & Zamroni Ishaq. (2024). Fungsi partai politik dalam pendidikan politik masyarakat. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(01), 62–68. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.
- Purnamawati, Evi. "濟無 No Title No Title." *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2017): 1689 – 99.
- Rudiansyah, Ardi. "Pengertian Partai Politik Dan Pemilu." *Jurnal Ilmu Politik* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baegaqi Arif. "Demokrasi (Bahan Ajar)." *Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional)*, 2016, 177– 201.
- Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>
- Dachlan 2014:1. "Demokrasi Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 61 (2014): 22–31.
- Fales, Suimi. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 199. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>.
- Khopipah, Siti, Komunikasi Strategis, Hubungan Masyarakat, Sosialisasi Dan, Pendidikan Pemilih, Di Masa, Pendidikan Pemilu, et al. "Issn: 2541-2078," n.d., 1–227.
- Khusnul Catur Prasetya, and Zamroni Ishaq. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 62–68.

-
- <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.
- Purnamawati, Evi. “濟無 No Title No Title.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 110, no. 9 (2017): 1689 – 99.
- Rudiansyah, Ardi. “Pengertian Partai Politik Dan Pemilu.” *Jurnal Ilmu Politik* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2016). *Demokrasi (bahan ajar). Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional)*, 177–201.
- Wijaya, A. (2014). *Demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>.